

## KONSTRUK PENYELENGGARAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA DI PTAI

**Muhammad Hadi**

(Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari)

### Abstrak

Konstruk sistem penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan agama di PTAI, dalam perjalanannya baru tahapan program pelatihan-pelatihan. Kondisi penjaminan mutu PTAI utamanya di Indonesia Timur saat ini dalam penyelenggaraanya tampak kurang optimal jika dilihat dari aspek manajemen, tujuan dan sasaran dalam pengendalian mutu pendidikan serta perbaikan proses pembelajaran. Fakta menunjukkan bahwa dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan, sering terjadi kelemahan yang berulang dan kekurangan yang tak kunjung usai, selain itu juga belum memperlihatkan perbaikan yang signifikan yang dilakukan pimpinan, bahkan kesalahan terjadi tidak jarang pada setiap tahunnya.

Konstruk tentang sistem penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan PTAI menggunakan pendekatan *manajemen* G. Lipsey dan Mervyn K. Lewis. Menurutnya *managenentis a process or form of work that involves the guidance ordirection of group of people toward organizatinal goals or objectives*. *Management* merupakan lembaga yang berproses melalui kinerja subjek yang melakukan proses hingga mencapai tujuan yang jelas atau *goal* pada suatu lembaga penjaminan mutu berfungsi mengontrol, mengevaluasi, pengaudit dan memperbaiki mutu pendidikan, terutama lingkup PTAI. Dalam teori manajemen seorang menejer akan melakukan kegiatan yang disebut manajemen *planning, organizing, staffing, motivating, controlling* untuk mencapai *goal*.

Fakta penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan lingkup PTAI belum maksimal dilakukan, kinerja lemah dan kurang berwibawa, bahkan terkesan masih diabaikan pada tingkat implementasinya maupun pelaksanaannya dilapangan, kegiatan penjaminan mutu hanya seputar pelatihan yang sesungguhnya kurang implementatif, dilihat dari perspektif manajemen. Penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan lingkup PTAI sesungguhnya adalah esesor internal atau “guru mutu” yang bertugas mengontrol, memonitor, mengaudit, mengevaluasi dan memperbaiki proses pendidikan, jika terjadi kesalahan atau kendala-kendala dalam penyelenggaraanya.

### **Abstract**

The construct organization of quaranting quality education religious in this case at Universiteis they are PTAI, in this way, it's still phase of the programe of trinning. The condition quaranting of quality education religious in operate semed less optimal if judging from the management aspect, purpose and targeted in education as well as the improvement of the learning. Process quality control. The fack that the process of the organizing of education often happened impotence and shortage but not there's improvement that significate had been done. Even made a mistake happens on recurrent every year.

The construct on the system organization of quarinting quality use upproach qualitative management of G Lipsey and Mervyn K. Lewis. He thinks management is a process or from of work that involves the guidance or direction of group of people toward organizational goals or objectives. Management is an institution that processed though the performance of the subject matter to achieve the purpose of clear or goal in institution (quaranting of quality, auditing etc) in case of manager ahall underlake the activities called management of planning, organizing, sttafing, motivating, controlling, to reach the goal.

The facts of organization of quarinting quality have not maximung eve weak and reduced in PTAI, and impressed still on the implementation as well as implementation of in the field. The activities of quarinting quality education religious, only surrounding the training of real the less implementatif be seen from perpectives management. Organizing the quarantee of quality of education religious is asesor of internal or "teacher of quality" that operate of controlling, monitoring, auditing, evaluate, and inprove. The procvss of education happen if the fault or the obstacles in organization.

### **Pendahuluan**

Kualitas penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan, utamanya di lembaga perguruan Tinggi Agama Islam, kawasan Indonesia Timur, terus mendorong adanya gagasan dalam rangka pengembangan tradisi keilmuan multi kultural dapat di implementasikan secara keseluruhan pada Sekolah Tinggi Agama atau Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI). Tanda-tanda kearah itu, tampak pada upaya-upaya pengiriman tenaga-tenaga guru atau dosen yang setiap kali diterjukan oleh pihak Kementerian Agama RI pada setiap perekrutan PNS dilingkup PTAI kawasan Indonesia Timur, terutama Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Manado, Ambon, Papua dan lain-lain. Akan tetapi dalam kenyataannya hingga saat ini, masih banyak terkendala beberapa faktor diantaranya sumberdaya manusia yang kurang memadai dari jumlah peserta didik, sarana dan prasarana informasi teknologi kampus juga belum terpenuhi secara maksimal, sehingga kuantitas dan

kualitas mutu pendidikan yang bersetandar nasional pun masih tetap terbelakang di banding dengan Perguruan Tinggi lain di Jawa. Oleh karena itu dalam menjaga kualitas mutu pendidikan, utamanya perguruan tinggi agama tidak bisa lepas dari unsur pokok tersebut di atas, selain peran penjaminan mutu atau pengendalian mutu pendidikan di suatu perguruan tinggi.<sup>1</sup> Senada dengan hal tersebut Abd. Rahman Assegaf menyatakan bahwa pendidikan nasional harus dikembangkan melalui mutu pendidikan atau pola pembaharuan kurikulum dalam suatu kelembagaan pendidikan.<sup>2</sup>

Konstruk penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan agama lingkup Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), terkait dengan mutu pendidikan berstandar ISO belum sepenuhnya dilakukan, terutama pada sistem penyelenggaraannya. Hal itu tampak jelas dilihat dari sisi oprasional kinerja oleh lembaga penjaminan mutu di beberapa perguruan tinggi agama kawasan Indonesia Timur, belum menunjukkan adanya tanda-tanda evaluasi perbaikan dan monitoring secara menyeluruh dilintas prodi ditinjau dari standard mutu secara nasional. Misalnya belum sinergi secara maksimal dalam melakukan rapattinjauan manajemen, danperbaikan sistem manajemen mutu yang ada di beberapa perguruan tinggi agama yang ada.

Ketertarikan penulis dalam mencermati hiruk pikuk penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan di perguruan tinggi agama, utamanya di Indonesia Timur, belum ada perubahan yang signifikan dibanding perguruan tinggi agama yang ada di Jawa dan masih jauh tertinggal dibelakang, baik dari sisi SDM dosen maupun teknologi informasi. Berdasarkan realitas pengamatan penulis kelembagaan penjaminan mutu pendidikan, seiring dengan perkembangan mutu pendidikan terus diperlukan, terutama perguruan tinggi yang ingin meningkatkan akreditasi dan institusi kejenjang yang lebih baik. Untuk bisa kearah tersebut, tentu di setiap penyelenggaraan penjamin mutu pendidikan baik pusat sampai unit harus mengarah kepada *progress* dan tututan perguruan Tinggi Agama Islam yang dibutuhkan. Atas permasalahan itu, sistem penyelenggaraan penjaminan mutu dapat

---

<sup>1</sup>Sentosa Sembiring, *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung:Nuansa Auliah, 2006), 121.

<sup>2</sup>Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta:Kurnia Kalam,2005).

mengeksplorasi dan mengaudit kualitas pendidikan melalui penjaminan mutu yang sesuai dengan budaya akademik dan kompetitif serta berdaya saing.

Disiplin keilmuan diberbagai perguruan tinggi agama, hampir melibatkan peran ketua program studi tanpa peran tersebut, mustahil dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Potensi bidang keilmuan disetiap jurusan tidak bisa dipandang sebelah mata, baik pada sisi pangkat atau golongan, tetapi disiplin keilmuan yang dipilih para peserta didik dalam berkuliah atau memilih jurusan mutlak ada pada keilmuan figur prodi atau jurusan. Ia yang mendesain kebutuhan kurikulum, kompetensi serta yang mengetahui secara utuh bidang keilmuannya, ibarat juru masak restoran, ia yang meracik bumbu, lauk hingga disajikan pada pelanggan (mahasiswa). Bertolak dari permasalahan tersebut, lalu bagaimana kinerja prodi bisa berkualitas jika profesionalisme dikebiri atau kurang dihargai,<sup>3</sup> maka dimungkinkan yang terjadi bisa sebaliknya regress bukan progress.

Kenyataan bahwa atmosfir perguruan tinggi agama, wakil bidang kemahasiswaan di level unit dekan lebih dihargai volume kerjanya. Dibanding peran prodi atau jurusan hal itu tampak pada intensif atau gaji yang lebih tinggi diberikan, dibanding dengan prodi atau jurusan, meski volume kerja atau beban kerja yang diemban lebih banyak dan berat. Paradigma konsep ikhlas beramal Kementerian Agama untuk saat ini perlu dikonstruksi, tidak lagi relevan untuk mengukur dalam tataran kinerja seseorang. Jika volume kerja dan peran ketua program studi lebih nyata diperlukan dilapangan bidang kompetensi program, dibanding tersebut di atas, akan tetapi keberadaannya dalam mengawal mutu pendidikan di institusi di sebuah perguruan tinggi agama Islam, kurang dihargai profesionalismenya.

### **Konstruksi Ikhlas Beramal Kementerian Agama**

Konstruksi arsitek penyelenggaraan mutu pendidikan dan struktur kelembagaan diperguruan tinggi agama sekarang perlu dilakukan perbaikan, jika kedepan kualitas mutu yang diinginkan dapat lebih bermutu dan berwibawa. Forum asosiasi prodi se-Indonesia harus bangkit untuk mengkonstruksi konsep ikhlas beramal, dan konsen mengawal kemajuan

---

<sup>3</sup>Dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi agama, justru para Prodi perguruan tinggi agama hampir secara nasioanl kinerjanya layak diasumsikan kerja rodi atau dizalimi oleh kelembagaan kementerian agama sendiri, dan kurang dihargai profesionalismenya (intensif yang memadai). Pengamatan beberapa perguruan tinggi Agama Indonesia Timur dan Jawa, 2011- Mei 2015.

perguruan tinggi agama dengan intensif gaji yang memadai bukan profesionalisme yang dizalimi. Dalam konsep Islam *أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه* atau dalam al-Qur'an *Fajahidu bi amwalikum wa anfusikum* artinya suatu kemajuan harus diimbangi dengan upah atau gaji yang memadai dalam rangka memacu sistem kerja yang lebih baik di lingkup perguruan tinggi agama atau PTAI.

Paradigma konsep ikhlas beramal di kementerian agama harus dikonstruksi, dan tampaknya tidak lagi dipandang rasional dan relevan untuk tantangan kemajuan zaman bidang pengembangan mutu pendidikan. Bahkan dalam tataran konsep sosiologi Peter Blauyang mengatakan bahwa gaji atau upa merupakan motivasi kerja bisa berjalan optimal dan maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas pegawai atau karyawan. Artinya ketergantungan ekonomi atau hadiah merupakan mekanisme yang tak dapat dihindarkan bagi seorang pemimpin untuk memikat para anggota organisasi (penyelenggara penjaminan mutu pendidikan) agar tetap eksis dalam menjagakualitas mutu suatu kegiatan atau posisi subjek.<sup>4</sup>

Landasan al-Qur'an, hadis, maupun pendekatan sosiologi di atas, tampak lebih rasional dibanding dengan konsep ikhlas beramal dalam 'logo' pada Kementerian Agama untuk peradapan kemajuan dalam menjaga mutu dan kualitas pendidikan dalam sebuah Perguruan Tinggi Agama. Karena itu, menurut penulis layak untuk dikonstruksi dengan konsep manajemen G. Lipsey sesuai dengan kenyataan subjek para pegawai yang kebanyakan malas menjalankan tugas negara, seiring dengan perkembangan zaman.

### **Arsitektur Ilmu Keislaman di Perguruan Tinggi Agama**

Terlepas dari permasalahan di atas, disetiap perguruan tinggi, harus punya ciri khas atau arsitektur bangunan konsep ilmu keislaman atau pohon keilmuan apa yang hendak ingin dicapai dalam merahi tujuan kedepan. Dalam kesempatan ini, penulis melalui jurnal ini menawarkan bangunan konsep untuk menjadikan *Ahsani Taqwim*<sup>5</sup> sebagai desain mutu

---

<sup>4</sup>Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Ali Mandan, (Jakarta: Kencana, 2005), 370. Periksa Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat* (Yogyakarta: Pilar media, 2006), 137.

<sup>5</sup>Pelu diketahui bahwa konsep *Akhasani Taqwim* adalah gagasan Dr. Muhammad Hadi, M.HI (Ketua Komite Jaminan Mutu, Jurusan Syari'ah STAIN Kendari, 2010) yang dikutip berdasarkan al-Qur'an surah at-Tin ayat: 4.

pembelajaran keagamaan Islam yang hendak di implementasikan dalam bentuk program pendidikan di lingkup perguruan tinggi agama. Konsep *Ahsani taqwim* adalah postur dan prosedur teoritis yang akan digambarkan dalam proses penyelenggaraan mutu pendidikan yang diharapkan berjalan sesuai dengan program, diagram dan sistem kebijakan atau ketentuan yang berlaku secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga seluruh program studi dan kelembagaan yang ada, dapat dikembangkan dan berada di bawah payung konsep atau desain *Ahsani Taqwim*. Secara metodologis gagasan konsep ini bersifat menguatkan, menilai ulang, dan mengkritik penyelenggaraan mutu pendidikan agama serta penjaminan mutu yang ada pada perguruan tinggi agama atau PTAI, utamanya dalam penyelenggara pusat penjaminan mutu (P2M) lingkup PTAI dalam berbagai teori manajemen para ilmuwan yang relevan.

Dari hasil kajian *Ahsani Taqwim* penulis memandang bahwa manusia memiliki keistimewaan dibanding makhluk lain, yakni akal dan pemahaman berfikir yang menyebabkan dirinya menjadi makhluk sebaik mungkin. *Ahsani Taqwim*, jika dipandang dari segi ajaran Islam juga memiliki nilai universalitas atau sebagai fenomena yang menarik dalam mereformulasikan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam di PTAI, terutama terkait dengan masalah-masalah sosial, hukum, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain. Oleh karena itu *Ahsani Taqwim* juga erat kaitannya dengan lima pokok karakter dalam Islam, yaitu. 1) hubungan diri dengan Allah, seperti salat, zakat, puasa dan seterusnya. 2) hubungan dengan sesama muslim. 3) hubungan antarmanusia dalam memajukan kehidupan bersama dengan prinsip perdamaian. 4) hubungan dengan lingkungan. 5) hubungan, agama, etika, moral dan pengetahuan dalam kehidupan. Secara keseluruhan tersebut di muka, bermuara pada tatanan bagi kebaikan manusia. Oleh karena itu *Ahsani Taqwim* bertujuan untuk menjaga lima hal prinsip, yakni agama, jiwa, keturunan, harta benda dan akal pikiran (*aql*).

Berpijak pada kelima prinsip dan ciri utama di atas, maka mengaris bawahi bahwa sosok *Ahsani Taqwim*. 1) memiliki komitmen terhadap keteguhan aqidah/spiritual agama dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah swt., serta mampu memilah yang baik dan jelek, lalu dipilih yang baik menurut dalil al-Qur'an dan paham keagamaan Islam walaupun harus menanggung cercaan dan resiko yang berat dari sekian banyak orang. 2)

menjaga hubungan sesama muslim dari tindak kejahatan, perpecahan, penindasan hak-hak azasi manusia dan perbuatan makar atau teroris yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 3) Bersedia bekerja sama dengan siapapun tanpa mempedulikan berbagai golongan, terutama terkait masalah-masalah sosial keagamaan dalam menciptakan kemaslahatan umat. 4) menjadikan lingkungan sekitar sebagai buku besar yang belum tersingkap dan harus digali sebagai ilmu pengetahuan dan tidak merusak atau mengabaikannya. 5) bersedia menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain untuk memperbaiki kehidupan, serta memiliki keberanian dalam menjawab persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang muncul di masyarakat.

Berpijak dari kelima ciri utama tersebut, maka tipologi *Ahsani Taqwim* diharapkan dapat dikembangkan di lingkup perguruan tinggi agama atau PTAI, yang memiliki ketangguhan akidah dan keluasan wacana keilmuan yang mampu menembus pada tataran realitas sosial empirik dan kontekstualis. Menurut undang-undang No.20/2003 tentang pendidikan nasional pasal 36 ayat 2, bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diferivikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Di dalam pasal 38 ayat 3 dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Berkenaan dengan UU tersebut, maka menjadikan konsep *Ahsani Taqwim* sebagai kunci dan solusi terhadap kegelisan seluruh pemikiran dan kajian keislaman dengan memperhatikan dasar dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan dilingkup STAIN, IAIN dan UIN, selain merupakan perwujudan dari prinsip diversifikasi yang memperlihatkan satandar nasional pendidikan.

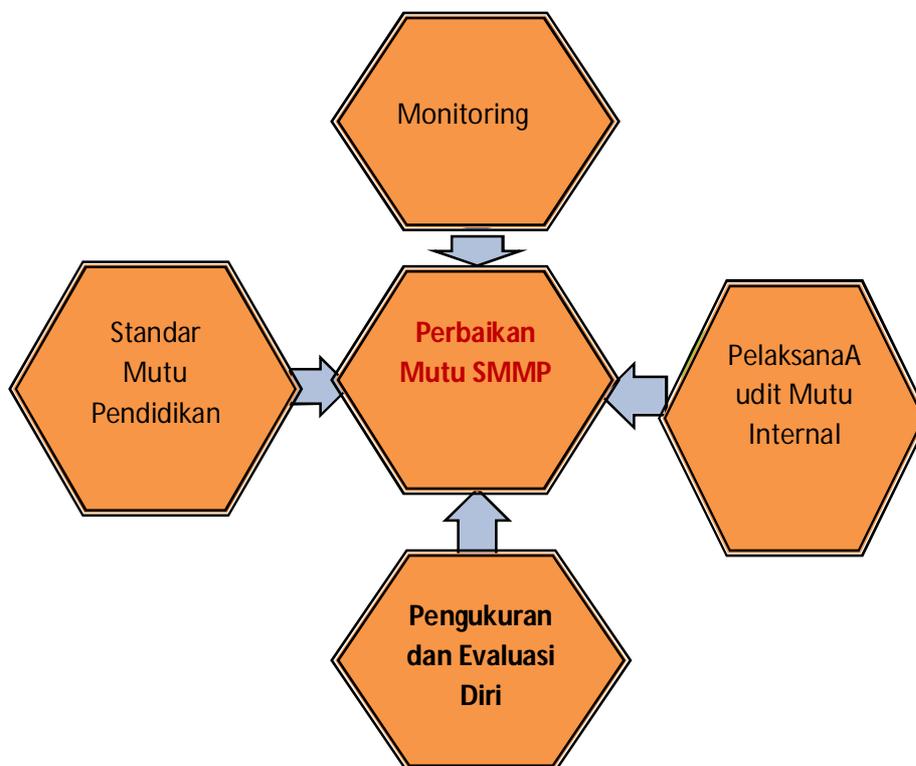
Untuk merealisasikan aspek-aspek yang berkaitan dengan mutu pendidikan keagamaan Islam tersebut, diperlukan arsitektur bangunan ilmu keislaman yang jelas. Perguruan Tinggi Agama Islam atau PTAI seperti STAIN, IAIN atau UIN, dirancang tidak hanya berkuat pada ilmu keagamaan Islam saja, tetapi juga bertugas menjaga mutu pendidikan bidang ilmu-ilmu sosial humaniora, sains dan teknologi yang hendak dikembangkan. Ajaran Islam yang digambarkan dalam sebuah sarang lebah yang di dalamnya terdapat madu yang bermanfaat bagi manusia. Sarang lebah yang menghasilkan

madu memberikan gambaran struktur keilmuan yang hendak dikembangkan di lingkup Perguruan Tinggi Agama atau PTAI dapat dijelaskan sebagai berikut.

*Lebah*, merupakan hewan yang memiliki belalai/jarum kecil yang ia gunakan untuk menyengat siapa saja yang mengganggunya, memberikan gambaran bagi siapa saja yang mengganggu keyakinan, keimanan dan ketentraman umat Islam harus kita perangi, dan tidak gentar pada siapapun meski ia harus mati karenanya. *Saripati bunga*, adalah makanan lebah yang dihisap lalu ditumpahkan dari perutnya berupa madu. Memberikan gambaran bahwa dalam kehidupan kita diuntut untuk memakan sesuatu yang baik-baik, halal dan menjauhi yang dilarang/haram, agar apa yang dikerjakan tidak berbahaya bagi orang lain. *Sarang lebah*, yang dibuat ditempat yang bersih, jauh dari polusi, seperti di pohon, gunung dan lain-lain, menggambarkan bahwa keilmuan agama harus ditanamkan pada manusia yang dengan niat yang bersih/suci ikhlas jauh dari sifat kotor dan menduduki tempat yang tinggi disisi Allah dan dimata manusia.

*Lubang bersegi enam* bertujuan menghindari adanya celah bagi masuknya serangga dan semacamnya, melambatkan pertahanan dalam menghadapi serangan dan pengaruh negatif yang disebar luaskan kalangan orientalis yang memusuhi Islam. *Madu* berfungsi sebagai obat penyembuhan bagi manusia, yang dipahami sebagai penyembuh terhadap penyakit manusia, seperti krisis moral, akhlak, budaya, agama, politik dan lain-lain. Selain itu, madu juga melambatkan amal saleh, artinya bahwa ilmu keislaman yang diperoleh harus di amalkan bagi manusia yang lain.

Untuk merealisasikan pemikiran tentang bagunan struktur keilmuan yang digambarkan pada lebah, sarang lebah dan madu tersebut, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) harus mengambil kebijakan bahwa semua mahasiswa dibeberapa jurusan harus terfokus pada basis ilmu keislaman yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Artinya ilmu yang dikembangkan tidak hanya ilmu Hukum Islam, Tarbiyah, Ekonomi Syariah, Dakwa, Adab, Ushuluddin, dan Bisnis Islam, akan tetapi juga ilmu kedokteran, sosial, budaya, kemaritiman, sains dan teknologi juga perlu mendapat perhatian serius pada perguruan tinggi agama Islam lingkup PTAI, terutama kawasan Indonesia Timur yang sesuai dengan SDM dan disiplin ilmu yang akan dikembangkan, sebagaimana yang digambarkan enam sudut sarang lebah.

**Siklus Kinerja Penjaminan Mutu Pendidikan AgamaPTAI****Rancangan sistem kerja penjaminan mutu pendidikan**

Rancangan sistem kerja penjaminan mutu yang ditawarkan di atas, kiranya dapat menemukan hasil nyata dalam mencapai tujuan. Karena itu, sistem kerja penjaminan mutu pendidikan tersebut, juga dapat diurai sebagai berikut. 1) Monitoring dilakukan untuk mencegah atau mendeteksi secara dini kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses. 2) Pengukuran dan evaluasi diri dilakukan oleh masing-masing program studi (Prodi) atau unit, terhadap proses yang telah dilakukan. Pengukuran dan evaluasi diri dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang ada di Prodi atau unit tersebut, telah berjalan sesuai dengan desain yang dimaksud. 3) Audit mutu internal dilakukan untuk mengetahui berbagai: a) kendala yang terjadi dalam pelaksanaan proses kegiatan di ketua prodi atau unit. b) kelemahan sistem yang telah direncanakan. c) kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan. 4) Audit Mutu Internal dilakukan untuk dicari jalan pemecahannya dari temuan proses belajar jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan. 5) Standar mutu

pendidikan didasarkan pada dokumen tentang kebijakan pendidikan, standar lulusan dan pedoman pendidikan PTAI disetiap fakultas dibuat dan ditetapkan untuk diimplementasikan. 6) Perbaikan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan (SMMP) dilakukan, jika kelemahan ditemukan pada sistem.

### **Fokus penyelenggaraan mutu pendidikan PTAI**

Titik fokus kajian keislaman PTAI adalah menjadikan lulusan yang bermutu dan mampu menciptakan pekerjaan sendiri, karena hanya lulusan bermutu yang mampu bersaing merebut peluang kerja baik lokal maupun nasional. Untuk mencapai cita-cita tersebut, dibutuhkan organisasi kelembagaan di lingkup PTAI dalam pengembangan sistem akademik yang, progresif dan inovatif. Salah satu komponen organisasi yaitu adanya *quality assurance* atau jaminan mutu pendidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis akan melihat secara objektif tentang kualitas penyelenggaraan mutu pendidikan di PTAI yang dikonstruksi dari wilayah kajian manajemen G.Leslie W. Rue dan Lloyd L.Byars, yang menyatakan bahwa manajemen merupakan proses untuk mencapai *goal*.<sup>6</sup> Pernyataan Leslie tersebut, akan memberikan justifikasi adanya keterkaitan manajemen dengan tujuan konstruk mutu penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam pada suatu lembaga, utamanya penyelenggaraan mutu pendidikan, sekaligus penjaminan mutu pendidikan di sebuah perguruan tinggi agama atau PTAI.

Selama ini, tampak P2M lingkup PTAI belum ada terobosan-terobosan yang menghasilkan *output* bermutu dalam sistem penyelenggaraannya, utamanya pada evaluasi mutu pembelajaran secara menyeluruh belum dilakukan dengan baik. Mesin perbaikan dan pengendalian mutu pendidikan P2M dalam hal ini masih bergerak lambat atau belum sungguh-sungguh berkerja sesuai teori manajemen yang ada untuk menjamin pendidikan berkualitas sebagaimana perguruan tinggi lain yang maju.

Untuk memperkuat dukungan penjaminan mutu setidaknya dibutuhkan *total quality managemen* yakni menuntut adanya keterlibatan dan tanggung jawab dalam organisasi.

---

<sup>6</sup>Leslie W. Rue dan Lloyd L.Byars, *Management: Theory and Application*, (Homewood: Richard Irwin, 1980). 6.

Menurut Sugeng Pinando menyatakan bahwa manajemen mutu terpadu merupakan aktivitas yang berusaha untuk mengoptimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan yang terus menerus atas produk,<sup>7</sup> dalam hal ini perguruan tinggi harus selalu melakukan perbaikan disetiap penyelenggaraan mutu pendidikan ketika terjadi kelemahan atau kesalahan. Manajemen mutu terpadu tidak hanya bersifat parsial, tetapi komperhensif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan produk yang dihasilkan. Masalah kualitas juga tidak lagi dimaknai dan dipandang sebagai masalah teknis akan tetapi sebagai rasionalitas instrumental dan ekonomis. Lebih dari itu rasionalitas sesungguhnya berorientasi pada terwujudnya kepuasan pelanggan atau konsumen. Sementara pada sisi yang lain kepuasan berkaitan dengan kualitas dan dapat di ukur dengan cara melakukan monitoring setiap saat, sehingga suatu keberhasilan mutu pendidikan dapat di ketahui secara jelas.

Dalam penyelenggaraan penjaminan mutu dibutuhkan suatu lembaga yang bertugas untuk membuat standar mutu internal, menetapkan kriteria penilaian, melakukan evaluasi diri, serta memberi rekomendasi pembinaan mutu. Penilaian mutu internal dapat dilakukan oleh dosen dan/atau staf administrasi yang terdidik dan terlatih untuk menjadi asesor internal. Hasil evaluasi diri digunakan untuk introspeksi diri dan melakukan langkah-langkah perbaikan internal, sebelum mengajukan akreditasi kepada pihak eksternal. Sedangkan unit dan tim pelaksana penjaminan mutu dapat berupa organisasi yang menyatu dengan struktur organisasi fakultas, jurusan dan program studi.

Adapaun sistem kerja panjaminan mutu bisa dibuat model secara berjenjang, misalnya a). badan penjaminan mutu tingkat universitas, institut dan tingkat sekolah tinggi. Tugasnya melakukan penjaminan mutu menyeluruh, menjabarkan kebijakan, membuat standar internal, melaksanakan pelatihan, membuat evaluasi diri (institusi), melakukan akreditasi institusi dan sebagainya. b) unit pelaksana penjaminan mutu tingkat fakultas atau jurusan, tugasnya mengoordinasi penjaminan mutu, mengoordinasi evaluasi diri program studi, memberi pelatihan dan sebagainya.<sup>8</sup>

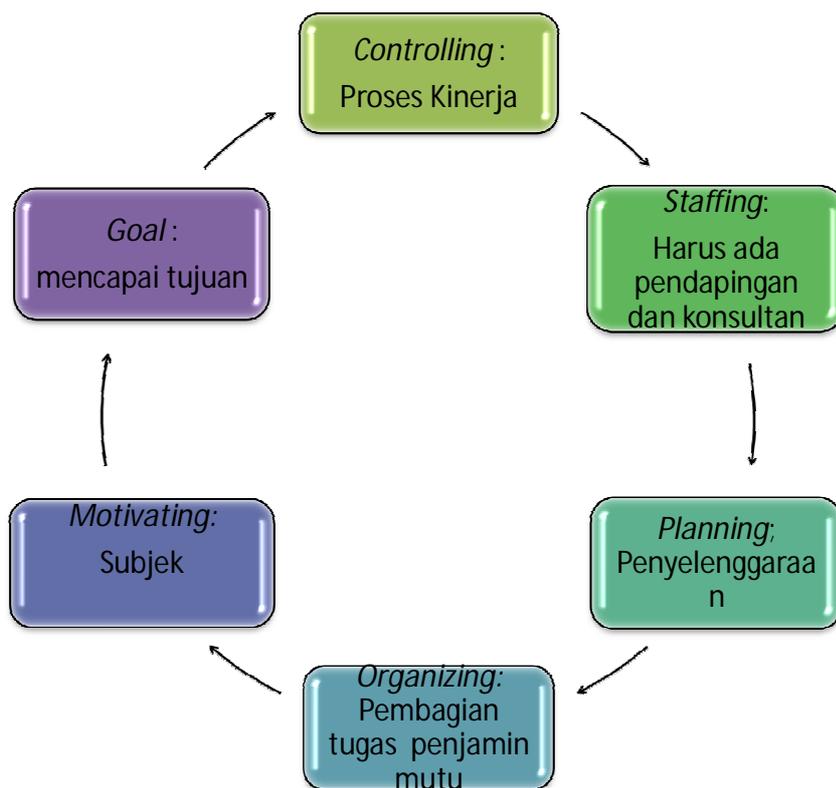
---

<sup>7</sup>Sudiyono, *Manajemen Pendidikan Tinggi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), 103.

<sup>8</sup>Hanief, *Manajemen penjaminan mutu*, 92

Kerangka teori manajemen G. Lipsey dan Mervyn K. Lewis, digunakan untuk membeda apakah penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan, berjalan sesuai fungsi organisasi manajemen atau tidak dapat dilihat skema di bawah ini.

**Konstruk manajemen G. Lipsey  
Penyelenggaraan Penjaminan Mutu Pendidikan.**



Bagan di atas, menggambarkan adanya hubungan yang dapat diuraikan sebagai berikut; suatu manajemen tidak bisa lepas dari organisasi yang saling terkait di mana hubungan antara yang satu dengan kelima unsur penting dalam *management*. Teori manajemen sebagaimana dalam bagan tersebut, menjelaskan bahwa organisasi menggerakkan subjek dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan. Dalam proses kinerja penjaminan mutu perlu ada kontrol yang intens untuk memantau kegiatan sejauh mana pekerjaan itu dilakukan, agar proses kinerja bisa berjalan dengan baik maka dibutuhkan pendampingan atau jasa konsultan dalam mencapai *goal* atau tujuan penjaminan mutu berkualitas sesuai dengan target perguruan tinggi yang bersangkutan.

Melalui bagan di atas, juga perlu diketahui lima langkah dalam penyelenggaraan penjaminan mutu, yakni adanya *organizing, planning, staffing, motivating dan controlling* yang berproses secara terus-menerus dan berkelanjutan. Realitas penyelenggaraan bisa berupa aksi yang di sesuaikan mekanisme ortaker Perguruan Tinggi Agama atau Kementerian Agama RI atau rencana aksi secara internal kampus berupa pelatihan-pelatihan atau pembinaan-pembinaan baik dosen maupun penilaian mahasiswa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di muka tidak diragukan lagi bahwa sistem penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan di lingkup PTAI, baik pada tingkat perencanaan strategi, tingkat kebijakan maupun tingkat implementasinya harus dikonstruksi dengan teori manajemen G.Lipsey. Melihat keadaan dan perkembangan penjaminan mutu pendidikan yang masih tergantung pada aktor pembuat kebijakan yang terkadang kurang berpihak pada penyelenggara penjaminan mutu pendidikan, sehingga menjadi berjalan apa adanya dengan konsep *lillahi ta'alah* atau ikhlas beramal. Beberapa kali pergantian nama lembaga penjaminan mutu pendidikan, juga sering menjadi penyebab perencanaan, kebijakan dan implementasinya berjalan kurang optimal, dalam sistem penyelenggaraan penjaminan mutu yang seharusnya.

Fakta menggambarkan bahwa, kebijakan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dan perbaikan mutu kurang memperoleh dukungan penuh dari pihak pemangku perguruan tinggi. Selain itu, pendanaan yang kurang diperhatikan kesejahteraannya menjadi menurun kinerja penjaminan mutu.<sup>9</sup> Peter Blau menyatakan ketergantungan upa bagi seseorang pekerja adalah cara untuk memikat para karyawan.<sup>10</sup> Seorang pemimpin harus peka terhadap kebutuhan gaji karyawan yang lesu, tidak bersemangat dalam bekerja bahkan bila perlu diberi hadiah.

Dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan di lapangan, ternyata para pengelola perguruan tinggi tidak mendapat gambaran lengkap dan utuh tentang bagaimana sistem penjaminan mutu internal dan evaluasi diri dilaksanakan. Fakta juga menunjukkan

---

<sup>9</sup>. Pengamatan perguruan tinggi Indonesia timur 2010-2013.

<sup>10</sup>George Ritzer and Douglas, *Modern Sociological Theori*, (London: Sage, 2001),109.

bahwa sistem evaluasi diri tidak berjalan pada keseluruhan lingkup PTAI atau berjalan tidak efektif dan tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya atau siklus penjaminan mutu pendidikan yang direncanakan. Para pengelola penjaminan mutu pun belum mendapat banyak gambaran utuh dan menyeluruh tentang bagaimana evaluasi dilakukan dan kepada siapa evaluasi diri dilakukan. Lalu bagaimana bentuk kelembagaan yang dapat menjamin serta memberi umpan balik *feed back* terhadap hasil evaluasinya.

Kemandirian dan idependensi lembaga penjaminan mutu pendidikan di PTAI adalah penting, karena dapat berpengaruh langsung pada kualitas mutu perguruan tinggi yang harus dijamin dan diberi hak penjaminan mutunya, sehingga kreadibilitas kerja dan profesionalismenya tidak lagi diragukan oleh para *stakeholder*-nya.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Amin. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ace Suryadi dan Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994.
- Al-Abrashi, Muhammad 'Atiyah. *Tarbiyah al-Islamiyah wa Falsafatuha*. Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1969.
- Assegaf, Abd. Rachman, *Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta:Kurnia Kalam,2005.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Beeby. *Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Pedoman Perencanaan*. Jakarta: LP3S, 1982.
- Buchari, Mochtar. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Furchan, Arief. *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kopetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghafur, Hanief Saha. *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

- Gunawan, Ary. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta Bina Aksara, 1986.
- Helmanita, Karlina dkk. *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: UIN Syahid, 2011.
- Kasim, Muhammad. *Kebijakan Departemen Agama dalam Penyelenggaraan Guru*. Disertasi 2009.
- Lauer, Robert. *Perspektif tentang perubahan sosial*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2003.
- G. Lipsey dan Lloyd L. Byars. *Management: Theory and Application*. Homewood: Richard Irwin, 1980.
- Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2009.
- *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung Rosda, 2005.
- Qomar, Mujamil. *Epistemologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga. 2005.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*. 2003
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sembiring, Sentosa. *Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen* Nuansa Aulia, 2006.
- Sentosa, Sembiring. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Soewito. *Kurikulum IAIN dalam Sejarah*, Makalah Semi Loka Penyusunan Kurikulum. 2000.
- Sudiyono, *Manajemen Pendidikan Tinggi*, Jakarta PT Rinika Cipta, 2004.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Taliziduhu Ndraha, *Manajemen Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987
- Trianto. *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta Bumi Aksara, 2010.
- Wibisono, Arif. *Mengembangkan Kurikulum Psikologi Berwawasan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press 2000.